

# RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2021-2026**



**KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021  
Jl. A. Yani No.003 Bengkalis**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat Nya sehingga perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis ini telah dapat diselesaikan secara baik berdasarkan hasil evaluasi hingga tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis ini merupakan dokumen perencanaan 5 ( lima ) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Bengkalis yakni dari tahun 2021 – 2026.

Secara umum Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 memuat keseluruhan kebijakan publik secara khusus membahas kebijakan publik sektor penanggulangan bencana yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Secara rinci Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing-masing bidang urusan dilingkungan badan penanggulangan bencana daerah. Dari telaah tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta priotas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2021-2026. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kadaruratan, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, selanjutnya disusun program program pembangunan, dan berbagai kegiatan dengan indikatif pendanaan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2021-2026 yang secara subtansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat Bangsa dan Negara. Amin Ya Rabbal Alamin.  
Wasalamu alaikum Wr.Wb.

Bengkalis, Desember 2021

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



**HADI PRASETYO, ST**  
Pembina Tk.I  
NIP.19790520 200502 1 001

# DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah .....	11
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	14
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan .....	18
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan .....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .	26
2.4.1. Analisis Lingkungan Internal.....	27
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal.....	27
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>29</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	33
3.3. Telaah RENSTRA BNPB dan RENSTRA BPBD Prov. Riau.....	37
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>42</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	42
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>47</b>
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	51
6.2. Kelompok Sasaran.....	54
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>61</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
8.1. Kesimpulan.....	63
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	63
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Kelompok Umur.....	11
Tabel 2.2	Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan Jabatan.....	12
Tabel 2.3	Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan.....	13
Tabel 2.4	Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	14
Tabel 2.5	Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	15
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.....	19
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis 2016-2020.....	23
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.....	23
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.....	25
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	31
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan-Permasalahan Penentuan Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis...	32
Tabel 3.3	Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	35
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan tugas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	37
Tabel 3.5	Identifikasi Isu Strategis KLHS.....	40
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	44
Tabel 4.2	Formulasi Perhitungan Masing-masing Indikator Terhadap Sasaran.....	45
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	47
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	48
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	55
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	10
Gambar 4.1	Analisa Pohon Masalah.....	42
Gambar 4.2	Analisa Pohon Tujuan.....	43
Gambar 4.3	Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator).....	43
Gambar 5.1	Matrik Analisa SWOT.....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang urusan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pelayanan informasi bencana kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dan penyelamatan dan evakuasi bencana yang lebih baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena merupakan salah satu komponen dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)

Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Pemerintah di tingkat pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan Renstra merupakan amanat Undang-undang dalam penyusunan ini adalah hal yang sangat penting sehingga Renstra ini disusun untuk:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai landasan hukum dalam penyusunannya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700).

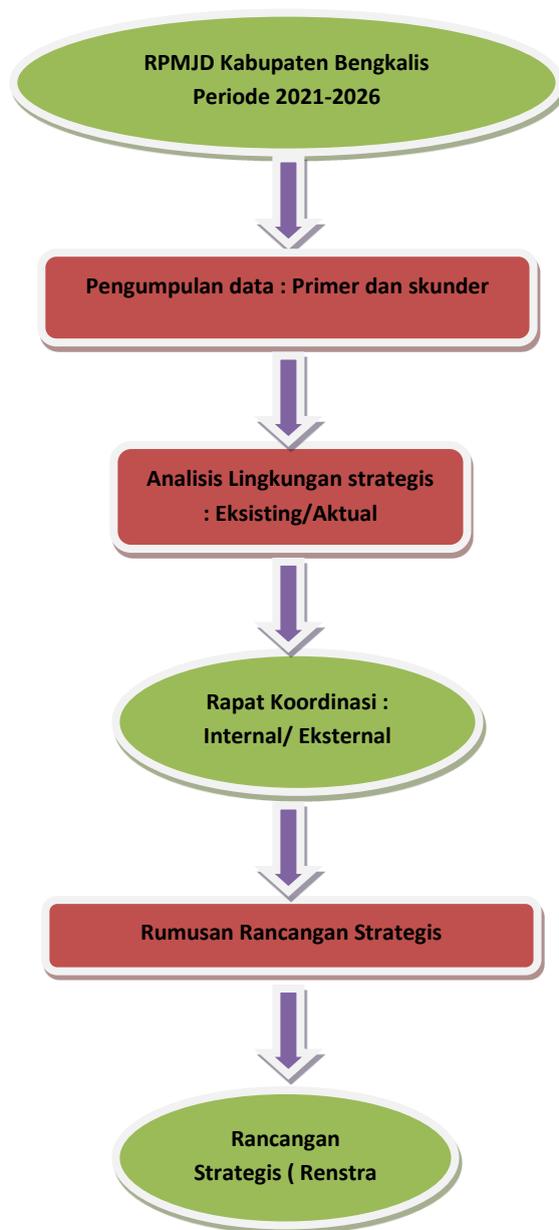
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

## 1. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok dan Fungsi yaitu Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana tanggap, darurat bencana dan pasca bencana diantaranya:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah dibidang penanggulangan bencana;
- Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekontruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Rencana Strategis



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);

17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;
18. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 050/BAPPEDA/1193/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun adalah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 07 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimasa mendatang;
4. Pedoman dalam penyusunan Renja pada setiap tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

##### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

##### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

##### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII: PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

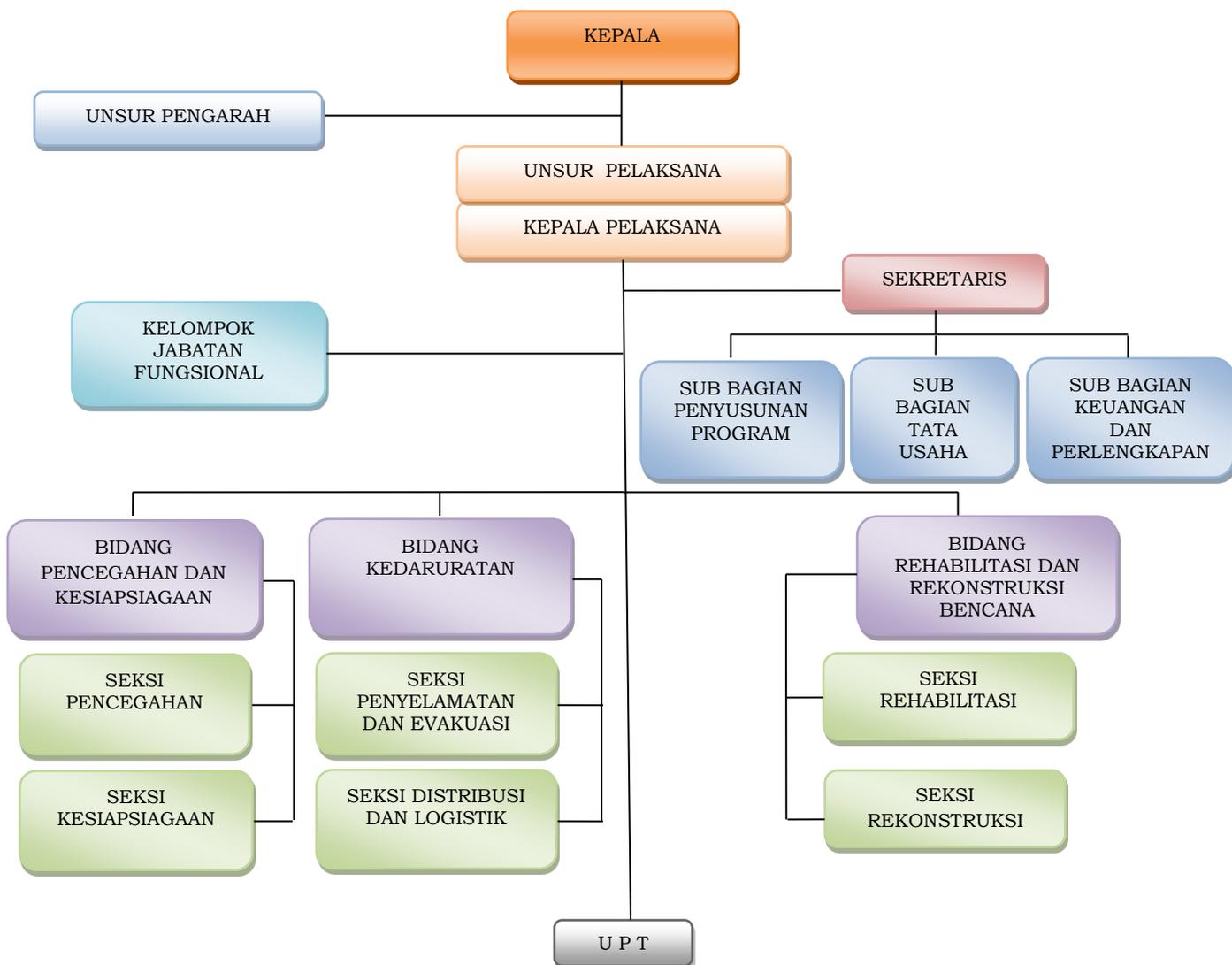
Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Penyusunan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi serta Rekonstruksi;
3. Menetapkan standarisasi, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan rehabilitasi serta Rekonstruksi;
4. Menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis membentuk struktur organisasi berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 87 tahun 2019 sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis



## 2.2. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

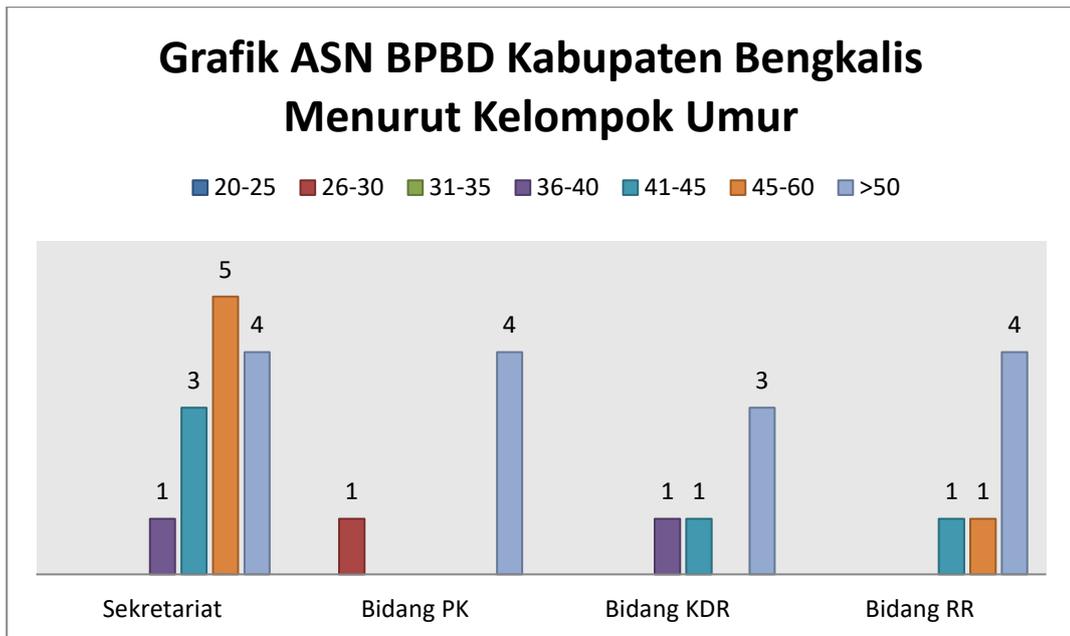
### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Maret 2021, jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah 29 orang PNS, dan Tenaga Kontrak sebanyak 174 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Kelompok Umur

NO.	UNIT KERJA	USIA TAHUN							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	>50	
1.	Sekretariat	-	-	-	1	3	5	4	13
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	1	-	-	-	-	4	5
3.	Bidang Kedaruratan	-	-	-	1	1	-	3	5
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	-	1	1	4	6
Total		-	1	-	2	5	6	15	29

Sumber Data : Sub. Bagian Tata Usaha Bpbd Kab. Bengkalis Tahun 2021.

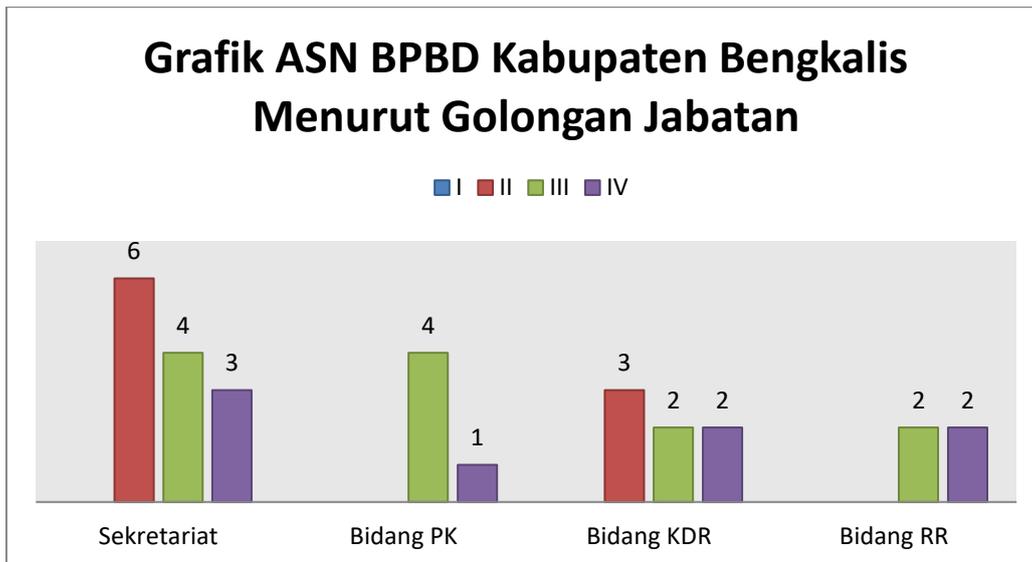


Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Masih di dominasi oleh usia muda dan produktif yakni usia 20-50 tahun sebanyak 12 orang sedangkan selebihnya 17 orang adalah usia >50 tahun.

Tabel 2.2  
Komposisi ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan Jabatan

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	Sekretariat	-	6	4	3
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	4	1
3.	Bidang Kedaruratan	-	3	2	2
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi			2	2
Total		-	9	12	8

Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Tahun 2021.

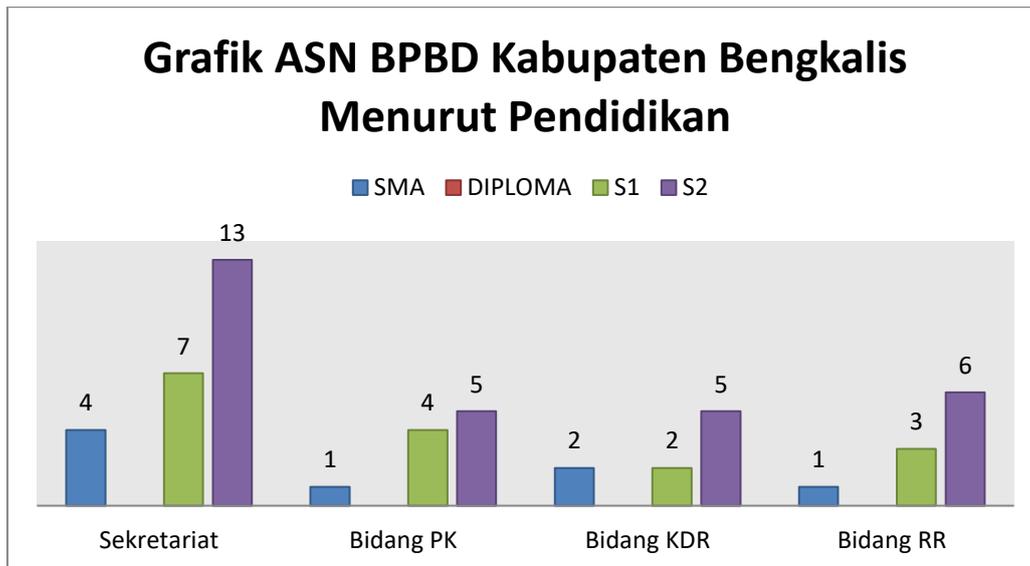


Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan peta jabatan ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh golongan III sebanyak 12 orang, Golongan II sebanyak 9 orang dan Golongan IV sebanyak 8 orang.

Tabel 2.3  
Komposisi ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1.	Sekretariat	4	-	7	2	13
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	-	4	-	5
3.	Bidang Kedaruratan	2	-	2	1	5
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	-	3	2	6
Jumlah		8	-	16	5	29

Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Tahun 2021.



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan pendidikan ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tingkat SMA sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 16 orang dan S2 sebanyak 5 orang.

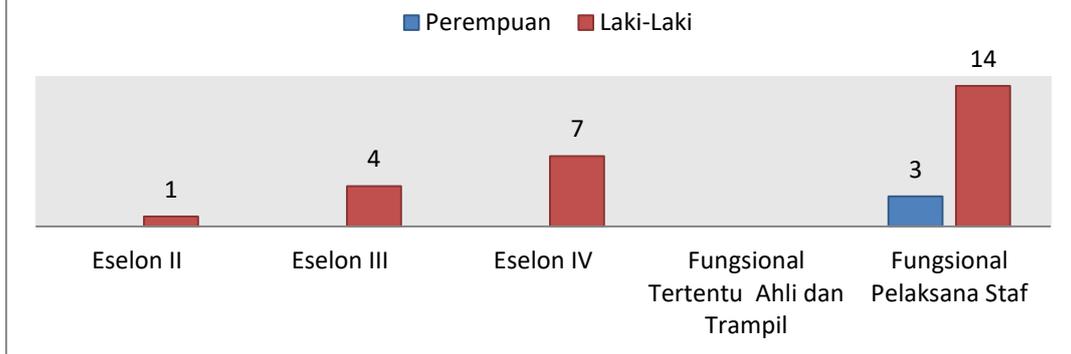
Tabel 2.4

Komposisi ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1.	Eselon II		1	1
2.	Eselon III		4	4
3.	Eselon IV		7	7
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)			
5.	Pelaksana (Staf)	3	14	17
Jumlah		3	25	29

Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Tahun 2021.

## Grafik ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan jenis kelamin ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh Laki-laki sebanyak 25 orang dan untuk perempuan sebanyak 3 orang.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.5  
Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Status	Kondisi
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Gedung</b>				
1.	Gedung Kantor	1	Unit	Hak Pakai	Baik
2.	Posko	5	Unit	Milik	Baik
<b>B.</b>	<b>Kendaraan Roda Empat</b>				
1.	Kendaraan Dinas/Operasional	2	Unit	Hak Pakai	Baik
2.	Kendaraan Rescue	3	Unit	Milik	Baik
<b>C.</b>	<b>Kendaraan Roda Dua</b>				
1.	Kendaraan Trail	5	Unit	Milik	Baik
2.	Kendaraan Dinas/Operasional	1	Unit	Milik	Baik
<b>D.</b>	<b>Perahu</b>				
1.	Perahu Karet+Mesin+Peralatan	3	Unit	Milik	Baik
2.	Speed Boat Amphibi	1	Unit	Milik	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Status	Kondisi
1	2	3	4	5	6
3.	Boat Rescue	1	Unit	Milik	Baik
<b>E. Peralatan Komunikasi</b>					
1.	Handy Talky	17	Unit	Milik	Baik
2.	Pesawat Radio Riq	3	Unit	Milik	Baik
3.	Hand Mic ( Pengeras Suara )	3	Unit	Milik	Baik
4.	Repeater	-	Unit	Milik	Baik
<b>F. Peralatan Penunjang</b>					
1.	Komputer	24	Unit	Hak Pakai	Baik
2.	Meja Kamputer	10	Unit	Hak Pakai	Baik
3.	Printer	19	Unit	Hak Pakai	Baik
4.	Laptop	14	Unit	Hak Pakai	Baik
5.	AC Ruangan	30	Unit	Hak Pakai	Baik
6.	Meja kerja	42	Unit	Hak Pakai	Baik
7.	Lemari Besi	4	Unit	Hak Pakai	Baik
8.	Lemari Arsip	22	Unit	Hak Pakai	Baik
9.	UPS	20	Unit	Hak Pakai	Baik
10.	GPS	-	-	-	-
11.	Mesin Ketik	4	Unit	Hak Pakai	Baik
12.	Kipas Angin	2	Unit	Hak Pakai	Baik
13.	Kursi Kerja	58	Unit	Hak Pakai	Baik
14.	Dispenser Air	-	Unit	Hak Pakai	Baik
15.	Hendy Tacki	17	Unit	Hak Pakai	Baik
16.	TV	7	Unit	Hak Pakai	Baik
17.	Filling Kabinet	23	Unit	Hak Pakai	Baik
18.	Overhead Projector/Infocus	1	Unit	Hak Pakai	Baik
19.	Mesin Photocopy	2	Unit	Hak Pakai	Baik
20.	Camera LCDR ( Digital )	-	Unit	Hak Pakai	Baik
21.	Alat Penghancur Kertas	5	Unit	Hak Pakai	Baik
22.	Faximili	-	Unit	Hak Pakai	Baik
23.	Lemari Pendingin	2	Unit	Hak Pakai	Baik
24.	Mesin Pendingin Kipas	2	Unit	Hak Pakai	Baik
25.	Hardisk	-	-	-	-
26.	Note Book	-	-	-	-
27.	Berangkas	1	Unit	Hak Pakai	Baik
28.	Serial Pointer	-	Unit	-	-
29.	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Hak Pakai	-
30.	Kompas	-	Unit	-	-
31.	Sound System	1	Unit	-	-
32.	CCTV	15	Unit	Hak Pakai	Baik
33.	Plotter	-	Unit	Hak Pakai	Baik
34.	Tenda Posko Pengungsi	8	Unit	Milik	Baik
35.	Tenda Pleton	1	Unit	Milik	Baik
36.	Tenda Regu	-	Unit	-	-
37.	Tenda Keluarga	4	Unit	Milik	Baik
38.	Velbed	-	Unit	-	-

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Status	Kondisi
1	2	3	4	5	6
39.	Server PUSDATIN	1	Set	Milik	Baik
40.	Senter LHD	-	Unit	Milik	Baik
41.	UPS	-	Unit	-	-
42.	Almari	-	Unit	-	-
43.	Mesin Ginset	1	Unit	Milik	Baik
44.	Papan Data	1	Unit	-	-
45.	White Board	1	Unit	Milik	Baik
46.	Kompor gas	1	Unit	Milik	Baik
47.	Peralatan Makan	-	Set	-	-
48.	Peralatan Masak	-	Set	-	-
49.	Handy Cam	-	Unit	-	-
50.	Tabung Gas	1	Unit	Milik	Baik
51.	Rompi Pelampung	6	Unit	Milik	Baik
52.	Tandu	1	Unit	Milik	Baik
53.	Baju Selam	-	Unit	-	-
54.	Tabung Selam	-	Unit	-	-
55.	Brifing Aparatus	1	Unit	Milik	Baik
56.	Mesin Pemadam	20	Unit	Milik	Baik
57.	Nuzle	47	Unit	Milik	Baik
58.	Y Connection	14	Unit	Milik	Baik
59.	Selang	60	Roll	Milik	Baik
	<b>Total</b>	<b>540</b>			

Sumber: Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Tabel 2.5 diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis maupun yang ada di Pos BPBD di Kecamatan, untuk Gedung Kantor 6 Unit, terdiri dari 1 gedung Utama dan Pos 5 Unit, Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 Unit, Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 Unit, Perahu 6 unit, Peralatan Komunikasi 23 Unit, Peralatan Penunjang sebanyak 494 unit. Dari tiga pengelompokan asset dapat dihitung keseluruhan jumlah total asset sebanyak 540 unit.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/

kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

### 2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan dalam bidang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2017-2020) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Posko Siaga Bencana di Setiap Kecamatan (Kecamatan Rukat Utara, Kecamatan Rukat, Kecamatan Bathin Sholapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bendar Laksamana).
2. Pelaksanaan Sosialisasi, Edukasi Kepada Masyarakat di Setiap Kecamatan Desa dan Kelurahan dengan terbentuknya Masyarakat Peduli Bencana (MPB).
3. Pembuatan Sarana Informasi yakni berupa Website BPBD sebagai upaya sarana mempermudah bagi masyarakat umum untuk melaporkan kejadian baik berupa layanan informasi juga sebagai sarana lapor kejadian bencana secara cepat.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 berikut ini:

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke - %				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana				n / a	5	15	25	35	n / a	10.3	90.27%	99.59%	78,18%	n / a	206	601.8	398.36	223.37
2	Level Tingkat Kesiapsiagaan				n / a	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	n / a	100	Level 2	Level 3	Level 4	n / a	2	3	4	4
3	Rata-rata waktu response kejadian bencana				n / a	20	50	70	85	n / a	10.3	98.62	99.11	97,12	n / a	51.5	197.24	141.58	114.25
4	Persentase bencana alam yang di tanggulangi				n / a	15	20	25	30	n / a	100	20	66.14	75,10	n / a	666.66	100	264.56	250.33
5	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				n / a	70	75	80	90	n / a	100	99.26	98.83	99,86	n / a	142.85	132.34	123.53	110.95
6	Indeks Kepuasan Masyarakat				n / a	50	70	85	95	n / a	100	98.62	99.12	94,03	n / a	200	140.88	116.61	98.87

Tabel 2.6 menjelaskan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Sasaran strategis Pada Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran strategis Pertama Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Siaga Bencana dengan 2 (Dua) Indikator yakni Persentase Desa/Kelurahan Masyarakat Siaga Bencana dengan target Kinerja Utama sebesar 35% dengan realisasi 78,18% dengan capaian 223,3% dibandingkan dengan Tahun ke 4 terdapat persentase capaian 398,3% realisasi kinerja 99,59% dan capaian 398,3% dilihat dari tabel diatas terjadi penurunan di bandingkan dengan tahun ke 4. Sedangkan Level Tingkat Kesiapsiagaan target Kinerja Utama Level 4 dengan realisasi Level 4 dengan capaian Level 4 dibandingkan tahun 4 terdapat sedikit kenaikan Level capaian namun realisasi kinerja dengan tahun ke 5, Kedua Meningkatnya Kualitas Waktu Respone Penanggulangan Bencana dengan 1 (satu) indikator yakni Rata-rata Waktu Respone Kejadian Bencana dengan target Kinerja Utama sebesar 85% dengan realisasi 97,12% dengan capaian 97,12% dibandingkan dengan tahun ke 4 terdapat sedikit penurunan dalam persentase capaian namun realisasi kinerja dengan tahun ke 5, Ketiga Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat dengan 1 (satu) Indikator yakni Persentase Bencana Alam yang di Tanggulasi dengan target Kinerja Utama sebesar 30% dengan realisasi 75,10% dengan capaian 250,3% dibandingkan dengan tahun ke 4 terdapat penurunan dalam persentase capaian namun realisasi kinerja tetap sama dengan tahun ke 5, Keempat Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pasca Bencana dengan 2 (dua) indikator yakni Persentase Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan target Kinerja Utama sebesar 90% dengan realisasi 99,86% dengan capaian 110,9% dibandingkan dengan tahun ke 4 terdapat sedikit Kenaikan dalam persentase capaian namun realisasi kinerja tetap sama dengan tahun ke 5, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan terget Kinerja Utama sebesar 95% dengan realisasi 94,03% dengan capaian 98,97% dibandingkan dengan tahun ke 4 terdapat sedikit penurunan dalam persentase capaian namun realisasi kinerja tetap sama dengan tahun ke 5.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator:

1. Terlaksananya Sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan tentang pemahaman terhadap siaga bencana pada 11 Kecamatan/Kota sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
3. Adanya dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana baik secara material maupun personil;
4. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
5. Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator:

1. Bencana Alam berupa kabut asap menjadi fenomena setiap tahun disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pembakaran untuk pemanfaatan hutan dan lahan.
2. Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan dimasyarakat belum ada.
3. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
4. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalah adalah :

1. Menumbuhkembangkan pemahaman masyarakat terkait akibat, dan bahaya yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan dengan ditunjang oleh sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.

2. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada dengan cara membangun system penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas seperti sosialisasi, video tron, pamflet, sepunder, baleho dan media cetak dan elektronik .
3. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif hal ini dapat dilakukan dengan penyusunan kajian resiko bencana, dan melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pengiriman petugas ASN, Recue, dan pusdatin untuk meningkatkan SDM ke BNPB.

### 2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

#### a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp.16.995.099.690,00 (Enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 92,66% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp.18.342.339.035,00 (Delapan belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	-	-	-
2	2017	4.198.022.639,00	3.888.754.026,00	92,63
3	2018	4.022.572.542,00	3.798.836.084,00	94,44
4	2019	5.466.301.205,00	4.812.529.008,00	88,04
5	2020	4.655.442.649,00	4.494.980.572,00	96,55
Jumlah		18.342.339.035,00	16.995.099.690,00	92,66

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp.1.347.239.345,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah ).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 44.007.026.724,00 (Empat puluh empat milyar tujuh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 27.109.248.292,00, (Dua puluh tujuh milyar seratus sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 61,60%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8  
Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis  
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	-	-	-
2	2017	4.915.190.700,00	4.593.010.040,00	93,45
3	2018	4.290.857.000,00	4.134.767.025,00	96,36
4	2019	16.272.334.624,00	8.645.805.859,00	53,13
5	2020	18.528.644.400,00	9.735.665.368,00	52,54
Jumlah		44.007.026.724,00	27.109.248.292,00	61,60

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis bisa dikatakan belum maksimal dengan predikat “Cukup”. Dalam hal ini perlu dioptimalkan lagi

mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp.16.897.778.432,00 (Enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp.11.001.756.681,00 (Lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sejumlah Rp.44.007.026.724,00 (Empat puluh empat milyar tujuh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 s/d 2020.

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Anggaran Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Belanja Tidak Langsung	-	4.198.022.639	4.022.572.542	5.466.301.205	4.655.442.649	-	3.888.754.026	3.798.836.084	4.812.529.008	4.494.980.572	-	92,63%	94,44%	88,04%	96,55%	0.11%	0.16%
II.	Belanja Langsung		4.915.190.700	4.290.857.000	16.272.334.624	18.528.644.400		4.593.010.040	4.134.767.025	8.645.805.859	9.735.665.368	-	93,45%	96,36	53,13	52,54	2.77%	1.12%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	972.109.500	1.104.546.500	1.560.978.700	1.788.819.400	-	918.013.338	1.027.859.566	1.361.903.411	1.608.072.906	-	94,44%	93,06%	87,25%	89,90%	0.84%	0.78%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	1.291.298.600	858.060.000	8.068.795.000	9.401.356.900	-	1.124.881.169	857.999.500	1.591.165.400	1.997.310.165	-	87,11%	99,99%	19,72%	21,24%	6.28%	0.78%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	99.375.000	77.500.000	-	-	-	98.640.300	77.200.000	-	-	-	99,26%	99,61%	0,00%	0,00%	-0.22%	-0.28%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100.000.000	173.000.000	88.166.600	157.500.000	-	99.701.960	145.714.459	88.166.600	71.789.004	-	99,70%	84,23%	100%	45,58%	0.58%	-0.28%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	-	243.000.000	536.281.500	1.238.538.200	1.108.270.000	-	223.900.000	530.881.500	946.358.200	1.056.270.202	-	92,14%	98,99%	76,41%	95,31%	3.56%	3.72%
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	2.549.052.400	1.541.450.000	6.861.391.436	5.396.339.200	-	2.467.518.073	1.495.092.000	4.658.212.248	5.002.223.091	-	96,80%	96,99%	67,89%	92,70%	1.12%	1.03%

Tabel di atas dapat dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 antara lain adalah :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada belanja tidak langsung sebesar 0,11% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 0.16%, sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhan minus dikarenakan prioritas anggaran dialokasikan pada peningkatan pelayanan urusan lainnya serta buruknya sistem perencanaan dan penganggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2018. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terlihat jelas gap antara realisasi dan anggaran, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

### 2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dapat dianalisa melalui lingkungan internal bisa dilihat pada tabel dibawah:

<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (weakness)</b>
Mempunyai SOTK Yang Sudah Jelas;	Kualitas SDM Masih Belum Memadai; (Meskipun Dari Segi Jumlah Aparatur/Pegawai Sudah Memadai, Namun Dari Segi Kualitas Masih Perlu Ditingkatkan Dengan Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Menyangkut Penanganan Kebencanaan, Managemen Bencana Sehingga Pemahaman Dan Implementasinya Sesuai Dengan Yang Diharapkan Yaitu Sdm Yang Handal Dan Profesional)
Terdapatnya Jumlah Aparatur Yang Memadai;	Belum Terdapatnya System Informasi Kebencanaan Dalam Daerah; (Belum Tersedianya Pengelolaan System Informasi Kebencanaan)
Penempatan Pesonil Sudah Ada Di Setiap Kecamatan;	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana; (Perlunya Pengadaan Sarana, Prasarana Dan Transportasi Untuk Mobilisasi Pembawaan Peralatan Dan Personil Dalam Rangka Penanggulangan Bencana)

### 2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dapat dianalisa melalui lingkungan eksternal bisa dilihat pada tabel dibawah:

<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Ancaman/Tantangan ( Threats )</b>
Tersedianya Jumlah Personil dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;	Luasnya Jangkauan wilayah Penanggulangan Bencana; (Kondisi tersebut menjadi kendala dalam penyelamatan, Evakuasi Penanggulangan Bencana)
Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penanggulangan Bencana Baik Status Siaga Darurat Maupun Tanggap Darurat Bencana;	Koordinasi antar Instansi Terkait Belum Maksimal; (Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan Instansi terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan khususnya)
Penanggulangan Bencana Di Tangani Secara Tim Dengan Melibatkan Steakholder Terkait;	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Resiko Bencana; (Meskipun Sosialisasi Baik Melalui Spanduk, Media Elektronik, Leaflet dan Komunikasi Langsung Namun Masih ada Kesadaran Masyarakat yang kurang paham Terhadap Resiko Bencana)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan.

Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan didalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi dimasa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah “***Belum Maksimalnya Keterpaduan Mitigasi Kebencanaan dan Penanganan Kebencanaan***”. Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan beberapa bidang diantaranya :

1. Permasalahan 1 Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
  - a. Belum maksimal Pelaksanaan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana.
  - b. Masih terbatasnya Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana.
  - c. Belum Tersedianya Regulasi Daerah terkait dengan Penanggulangan Kebencanaan.
2. Permasalahan 2 Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut:
  - a. Lambatnya Informasi yang diterima dalam Penetapan Status Darurat Bencana.
  - b. Keterbatasan Sarana Prasarana dan Logistik (pangan, sandang, papan dll) Kebencanaan.
  - c. Belum Maksimal Koordinasi Petugas dilapangan antar Instansi terkait dalam Penanggulangan Bencana.
3. Permasalahan 3 Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut
  - a. Kurangnya kompetensi SDM yang memiliki keahlian dalam bidang perhitungan kajian kerusakan dan kerugian pasca bencana;
  - b. Belum adanya Regulasi Teknis Penanganan Pasca Bencana;
  - c. Kurangnya Koordinasi antar Instansi dalam Penanganan Pasca Bencana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tabel dibawah ini:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan-permasalahan Pelayanan  
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum Maksimal Keterpaduan Mitigasi Kebencanaan dan Penanganan Kebencanaan	Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsigaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimal Pelaksanaan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana.</li> <li>2. Masih terbatasnya Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana.</li> <li>3. Belum tersedianya Regulasi Daerah terkait dengan Penanggulangan</li> </ol>
	Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lambatnya Informasi yang diterima dalam Penetapan Status Darurat Bencana;</li> <li>2. Keterbatasan Sarana Prasarana dan Logistik (pangan, sandang, papan dll) Kebencanaan;</li> <li>3. Belum Maksimal Koordinasi Petugas dilapangan antar Instansi terkait dalam Penanggulangan Bencana.</li> </ol>
	Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kompetensi sdm yang memiliki keahlian dalam bidang perhitungan kajian kerusakan dan kerugian pasca bencana;</li> <li>2. Belum adanya regulasi teknis penanganan pasca bencana;</li> <li>3. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam penanganan pasca bencana.</li> </ol>

Dilihat dari table identifikasi permasalahan dan akar masalah dan pelayanan masih Belum Maksimal Keterpaduan Mitigasi Kebencanaan dan Penanganan Kebencanaan dikarenakan Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsigaan, Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Hal ini perlu peningkatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Permasalahan-permasalahan Penentuan Program Prioritas**  
**Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanggulangan Bencana			
1.1.	Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	Belum tercapai (<)	Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis
1.2.	Persentase Response Cepat Kejadian Luas Biasa (KLB) Bencana	Belum tercapai (<)	Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1.3.	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	Belum tercapai (<)	Belum Maksimal Keterpaduan Layanan Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	

Berdasarkan tabel identifikasi permasalahan penentuan program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang di uraikan pada table 3.2 dengan interpretasi Belum tercapai dikarenakan masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dan untuk menentukan keberhasilan program penanggulangan bencana perlunya Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi Pengkoordinasian; Pengkomandoan, dan Pelaksana.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 12, 13 dan 14 dijelaskan Fungsi Koordinasi BPBD adalah Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya didaerah, instansi vertikal yang ada didaerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra

bencana dan pasca bencana. Fungsi Komando BPBD adalah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah- langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan Fungsi Pelaksana BPBD adalah melaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerja pelayanan PD kepada masyarakat. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

**Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan Kepala Daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera”***  
***(BERMASA)***

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bermartabat, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi Pemerintah yang professional dan berwibawa.
3. Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian. Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.  
Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean government; meningkatkan nilai-nilai agama dimasyarakat; penguatan

nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

Dari rumusan visi dan misi diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat diidentifikasi masuk pada misi ke 2 dan misi ke 3, bisa dilihat pada tabel 3.3 dibawah:

**Tabel 3.3**  
**Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dan Misi RPJMD**  
**Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA</b>				
<b>Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.</b>				
2.1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	2.1.1. Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah.	2.1.1.1.1. Penguatan akselerasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	2.1.1.1.1. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
		2.1.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat.		
		2.1.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).		
			2.1.1.1.5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1.5.1. Menyediakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.</b>				
3.2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2.2. Indeks Resiko Bencana	3.2.2.1.1. Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan	3.2.2.1.1.3. Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis.

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan daerah dalam mencapai dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung Visi Misi dengan Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang sejalan yakni:

**Tujuan :** Terwujudnya Keterpaduan Mitigasi Kebencanaan dan Penanganan Kebencanaan yang Responsif dan Dinamis

**Sasaran :**

- (1) Meningkatnya Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- (2) Meningkatnya keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- (3) Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

**Strategi :**

- (1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana.
- (3) Peningkatan kualitas pengelolaan sistem informasi kebencanaan.
- (4) Peningkatan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana.
- (5) Peningkatan logistik bencana.
- (6) Peningkatan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana.

**Arah Kebijakan :**

- (1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana.
- (2) Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (3) Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem informasi kebencanaan.
- (4) Meningkatnya kegiatan penyelamatan dan evakuasi bencana.
- (5) Tersedianya logistik bencana sesuai kebutuhan.
- (6) Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana.

Tabel 3.4  
Visi, Misi Tujuan, sasaran dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan tugas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera</b>											
<b>Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.</b>											
2.1	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Indek Reformasi Birokrasi	50	53	56	59	63	67	72	72	
	2.1.1	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
			Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	83	85	86	87	90	95	95	95
<b>Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.</b>											
3.2	Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,67	70,7	70,85	71	71,14	71,29	71,44	71,44	
	3.2.2	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berwawasan Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	n/a	109,48	100,1	90,71	81,33	71,94	62,56	62,56

### 3.3. Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Riau.

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dan Nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau serta Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024 searah dan sejalan dengan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 yakni “BNPB yang handal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka cara-cara yang akan ditempuh atau misi pembangunan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :
  1. Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
  2. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
  3. Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
  4. mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan visi tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dibidang penanggulangan Bencana. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategis penataan Ruang Wilayah Kabupaten diantaranya adalah melaksanakan kebijakan menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis.

Dari isu strategis menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Tangguh yaitu dengan cara peningkatan kualitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengembangan sistem manajemen penanganan bencana terpadu serta peningkatan kualitas pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pencapaian pengendalian kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dengan strategi meliputi:

- a. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sesuai sifat dan jenis bencana alam berupa bencana kebakaran hutan dan lahan, Abrasi, Puting Beliung dan Banjir;
- b. Mengidentifikasi tingkat resiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam;
- c. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
- d. Mengembangkan sistem mitigasi bencana; dan
- e. Mengembangkan manajemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

Untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan kawasan rawan berupa bencana;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan sosialisai terhadap wilayah masyarakat yang memiliki potensi bahaya bencana;
- c. Pembangunan ruang evakuasi bencana;
- d. Pembangunan jalur-jalur evakuasi;
- e. Penetapan daerah rawan bencana sebagai kawasan konservasi.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya koordinasi BPBD dengan PD dalam penanggulangan bencana disebabkan minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti penting ancaman bencana. Sementara ini masih ada paradigma meremehkan bencana yang berimbas pada minimnya anggaran untuk kebencanaan. Padahal resiko yang ditimbulkan bencana selama ini berdampak serius pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Semua hasil

pembangunan selama bertahun-tahun dapat musnah hanya dalam waktu singkat.

- b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan luasnya wilayah penanganan bencana sehingga diperlukan ekstra waktu tempuh karena jarak antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan lokasi kebencanaan yang ada.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, kebijakan Nasional, Berbagai permasalahan pembangunan bidang penanggulangan bencana yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang penanggulangan bencana. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra BNPB, sasaran jangka menengah dari Renstra BPBD Prov. Riau, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Identifikasi Isu Strategis KLHS

No	Tingkat Isu	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Belum tersedianya data lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi kebencanaan	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis

Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan RPB ke dalam RPJMD salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas Daerah di daerah. Sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penanggulangan bencana, kapasitas penanggulangan bencana juga ditinjau pada fase terdapat potensi terjadinya bencana dan fase tanggap darurat. Pelaksanaan penanggulangan bencana pada fase tersebut mengharuskan adanya kapasitas perencanaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk

menanggulangi bencana. Sistem peringatan dini dan analisis risiko merupakan tuntutan kapasitas untuk mengembangkan skenario, kebijakan dan strategi kontijensi Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana.

2. Pembentukan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun. Semestinya sesuai dengan paradigma baru penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta kapasitas aparaturnya tanggap darurat bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana.

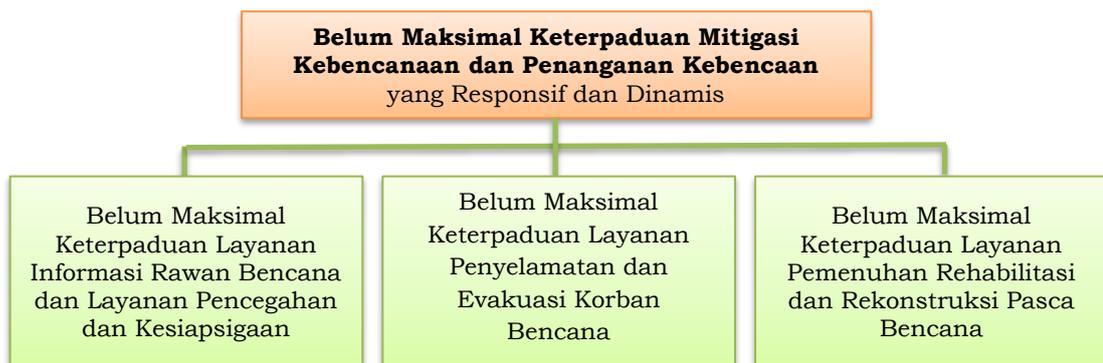
## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

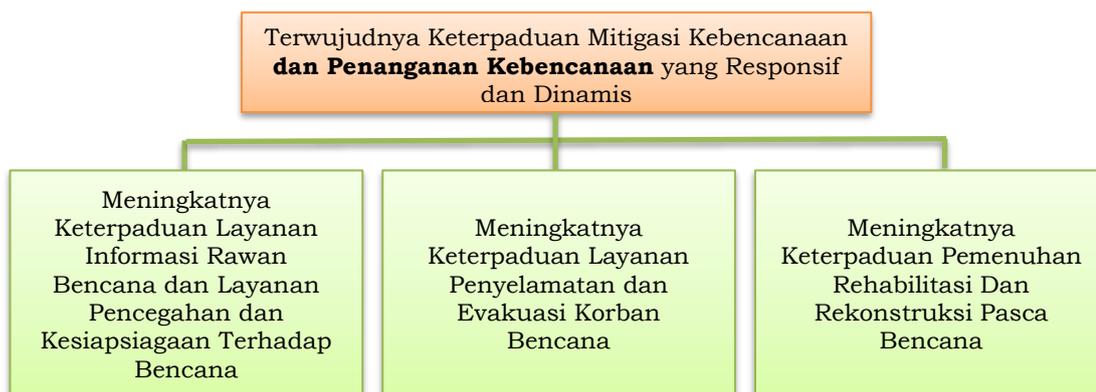
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 4 (empat) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan dapat di analisa melalui pohon masalah, pohon tujuan dan analisa keberhasilan indikator tujuan, yakni:

Gambar 4.1 Analisa Pohon Masalah (-)



Gambar 4.2 Analisa Pohon Tujuan (+)



Gambar 4.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Keterpaduan Mitigasi dan Penanganan Kebencanaan Yang Responsif dan Dinamis	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	95%	95%	95%	95%	95%
			Meningkatnya keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Response Cepat Kejadian Luas Biasa (KLB) Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	60%	70%	80%	90%	100%

Tabel 4.2  
FORMULASI MASING-MASING INDIKATOR KINERJA UTAMA TERHADAP SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL/PENJELASAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	Warga Negara yang mendapatkan Layanan Sosialisasi, Edukasi, Informasi dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Sosialisasi, Edukasi, Informasi dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan ----- x 100% Jumlah Warga Negara dikawasan Rawan Bencana
	Meningkatnya keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Response Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana	Persentase (%) Kecepatan Response Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB Bencana dan Darurat Bencana	Jumlah kesempatan response kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Bencana dan Darurat Bencana ----- x 100% Jumlah Seluruh Penetapan KLB Bencana dan Darurat Bencana
	Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	Kawasan Terkena Bencana yang Memperoleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Kawasan yang Memperoleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ----- x 100% Jumlah Kawasan yang Terdampak Pasca Bencana

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Adapun strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BENGKALIS 2021-2026

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA				
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	2.2.1. Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.2.1.1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. 2.2.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat. 2.2.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).	2.1.1.1.1. Penguatan akselerasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	2.1.1.1.1.1. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
			2.1.1.1.2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.	2.1.1.1.1.1. Melaksanakan sinergitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.
			2.1.1.1.5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1.5.1. Menyediakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi.
Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.				
3.3. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	3.3.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2.3. Indeks Resiko Bencana	3.3.2.1.1. Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan	3.2.2.1.1.3. Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsive dan dinamis.

Tabel 5.2  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BPBD KABUPATEN BENGKALIS 2021-2026

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA					
Misi III : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Keterpaduan Mitigasi dan Penanganan Kebencanaan Yang Responsif dan Dinamis	1. Indeks Resiko Bencana	1. Meningkatnya Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.1. Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	1.1.1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan	1.1.1.1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan
				1.1.2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana	1.1.2.1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana
				1.1.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.1.3.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
		2. Meningkatnya Keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.1. Persentase Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana	2.1.1. Peningkatan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	2.1.1.1. Meningkatnya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana
				2.2.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Logistik Bencana	2.2.2.1. Tersedianya Logistik Bencana Sesuai Kebutuhan

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA					
Misi III : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Keterpaduan Mitigasi dan Penanganan Kebencanaan Yang Responsif dan Dinamis	1. Indeks Resiko Bencana	3. Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	3.1. Persentase Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	3.1.1. Peningkatan Koordinasi yang Baik dalam Penanggulangan Bencana	3.1.1.1. Meningkatkan Koordinasi antar Instansi Yang Baik dalam Penanggulangan Bencana

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dihasilkan dari analisa SWOT :

<b>Faktor Eksternal</b>	<b>Peluang (O) :</b> 1. Tersedianya Jumlah Personil dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penanggulangan Bencana Baik Status Siaga Darurat maupun Tanggap Darurat Bencana; 3. Penanggulangan Bencana Di Tangani Secara Tim Dengan Melibatkan Stakeholder Terkait	<b>Tantangan (T):</b> 1. Luasnya Jangkauan wilayah Penanggulangan Bencana; 2. Koordinasi antar Instansi Terkait Belum Maksimal; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Resiko Bencana;
<b>Faktor Internal</b>		
<b>Kekuatan (S)</b> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 3. Penempatan Personil Sudah Ada Di Setiap Kecamatan;	<b>Alternatif Strategi (S-O):</b> 1. Peningkatan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	<b>Alternatif Strategi (S-T):</b> 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana;
<b>Kelemahan (W):</b> 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum terdapatnya informasi kebencanaan dalam daerah; 3. Kurangnya sarana dan prasarana Serta Logistik bencana;	<b>Alternatif Strategi (W-O):</b> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Logistik Bencana; 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan;	<b>Alternatif Strategi (W-T):</b> 1. Peningkatan Koordinasi Yang Baik dalam Penanggulangan Bencana;

Gambar 5.1 Matrik Analisis SWOT

Matrik SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi keempat faktor yang tercakup dalam analisis yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matrik SWOT digunakan untuk mengembangkan empat tipe alternatif strategi yaitu SO (strengths- opportunities), strategi WO (weaknesses opportunities), strategi ST (strengths-threats), dan strategi WT (weaknesses- threats). Terdapat empat tahapan dalam membentuk matrik SWOT yaitu:

- a. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi SO.
- b. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi WO
- c. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi ST.
- d. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman dan mencatat resultan strategi WT.

Analisis ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis seperti tergambar pada Matrik SWOT Gambar 5.1 di atas.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Program, Kegiatan Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2021-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penanggulangan Bencana

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis :

#### **6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - c. Pengadaan Mebel
    - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## II. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana. sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - e. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  - f. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - g. Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota
  - h. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - i. Penyusunan Rencana Kontijensi
  - j. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - k. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
  - b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - f. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  - e. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

## **6.2. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yakni sarana, prasarana dan layanan penanggulangan bencana yang menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu serta aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu dan masyarakat. Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	LOKASI			
						DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	RP	
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	
Meningkatkan Tata kelola Administrasi, Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Administrasi, Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Persentase PemenuhanTata kelola Administrasi, Kantor (Umum dan Kepegawaian) 100%	0101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah			6.195.734.720	100%	6.249.234.438	100%	6.351.142.635	100%	6.432.417.728	100%	6.514.835.217	100%	6.722.399.253	100%	6.722.399.253	BPBD	Kabupaten Bengkulu		
			0101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			600.000.000	100%	675.000.000	100%	675.000.000	100%	700.000.000	100%	675.000.000	100%	675.000.000	100%	675.000.000	BPBD	Kabupaten Bengkulu		
			0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	175.000.000	2 dokumen	175.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	175.000.000	2 dokumen	175.000.000	2 dokumen	175.000.000	2 dokumen	175.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu
			0101	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen RKA-SKPD yang disusun		2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	250.000.000										
			0101	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun		1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000												
			0101	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Bagi ASN BPBD			4.528.392.638	100%	5.023.961.970	100%	5.023.961.970	100%	5.023.961.970	100%	5.023.961.970	100%	5.023.961.970	100%	5.023.961.970	100%	5.023.961.970	BPBD	Kabupaten Bengkulu
			0101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	4.528.392.638	1 Tahun	5.023.961.970	1 Tahun	5.023.961.970	1 Tahun	5.023.961.970	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu								
			0101	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang yang dikuasai SKPD			192.000.000	100%	192.000.000	100%	307.000.000	100%	307.000.000	100%	307.000.000	100%	422.400.000	100%	422.400.000	100%	422.400.000	BPBD	Kabupaten Bengkulu
			0101	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang digunakan; dan terpenuhinya Pelugas Keamanan Kantor yang dalam 1 tahun		10 Orang	192.000.000	10 Orang	192.000.000	16 Orang	307.000.000	16 Orang	307.000.000	22 Orang	422.400.000	22 Orang	422.400.000	22 Orang	422.400.000	22 Orang	422.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu
			0101	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Bagi ASN BPBD			600.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	BPBD	Kabupaten Bengkulu
0101	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas kerja lapangan		129 Pasang	350.000.000	129 Pasang	200.000.000	129 Pasang	200.000.000	129 Pasang	200.000.000	129 Pasang	200.000.000	129 Pasang	200.000.000	129 Pasang	200.000.000	129 Pasang	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bengkulu			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			0151209	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase kemampuan aparatur/ pegawai dalam penanggulangan bencana			26 Orang	100.000.000	26 Orang	100.000.000	26 Orang	100.000.000	26 Orang	100.000.000	26 Orang	100.000.000	26 Orang	100.000.000	26 Orang	100.000.000	Daerah	
			0151211	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai aparatur mengikuti pelatihan teknis dan fungsional. Jumlah ASN memahami pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			13 Orang	150.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000										
			0151206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Bagi ASN BPBD				1.210.000.000	100%	1.186.805.878	100%	1.186.805.878	100%	1.225.000.000	100%	1.180.000.000	100%	1.180.000.000	100%	1.180.000.000	BPBD	Kabupaten Bengkulu
			0151206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun			16 item	100.000.000	16 item	76.805.878	16 item	76.805.878	16 item	100.000.000	16 item	70.000.000	16 item	70.000.000	16 item	70.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu
			0151206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun, 2. Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun			82 item	150.000.000	82 item	150.000.000	82 item	150.000.000	82 item	150.000.000	82 item	150.000.000	82 item	150.000.000	82 item	150.000.000		
			0151206	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkulu Setiap tahunnya			2500 Box	85.000.000	2500 Box	85.000.000	2500 Box	85.000.000	2500 Box	100.000.000	2500 Box	85.000.000	2500 Box	85.000.000	2500 Box	85.000.000		
			0151206	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan bahan publikasi media informasi yang terpenuhi dalam 1 tahun			9 item	100.000.000	9 item	100.000.000	9 item	100.000.000	9 item	100.000.000	9 item	100.000.000	9 item	100.000.000	9 item	100.000.000		
			0151209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam daerah			1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000		
			0151206	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pemeliharaan Website BPBD			1 Tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000		
			0151207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan aset Sebagai Penunjang Urusan BPBD				2.190.126.720	100%	2.000.000.000	100%	1.986.908.197	100%	1.627.910.000	100%	1.781.056.003	100%	1.988.620.039	100%	1.988.620.039	BPBD	Kabupaten Bengkulu
			0151207	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia dalam 1 tahun			2 Unit	1.000.000.000	3 Unit	500.000.000	-	216.308.197	3 Unit	1.254.100.000	-	-	3 Unit	1.254.100.000	3 Unit	1.254.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						TARGET	RP	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	RP				
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			015120	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia dalam 1 tahun			4 Unit	690.126.720	4 Unit	1.000.000.000	4 Unit	1.520.600.000	-	-	4 Unit	1.520.600.000	3 Unit	360.710.039	3 Unit	360.710.039				
			015125	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun			93 unit, 4 Set	250.000.000	93 unit, 4 Set	250.000.000	-	-	93 unit, 4 Set	373.810.000	-	-	93 unit, 4 Set	373.810.000	93 unit, 4 Set	373.810.000				
			015127	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan, Perlengkapan dan Gedung Kantor yang tersedia dalam 1 tahun			33 Unit	250.000.000	33 Unit	250.000.000	33 Unit	250.000.000	-	-	33 Unit	260.456.003	-	-	-	-				
			015128	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan BPBD				478.608.000	100%	746.878.560	100%	746.878.560	100%	746.878.560	100%	746.878.560	100%	746.878.560	100%	746.878.560	BPBD	Kabupaten Bengkulu		
			015128	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Administrasi, Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun			1 Orang; 1500 lembar	36.600.000	1 Orang; 1500 lembar	36.600.000	1 Orang; 1500 lembar	36.600.000	1 Orang; 1500 lembar	36.600.000	1 Orang; 1500 lembar	36.600.000	1 Orang; 1500 lembar	36.600.000	1 Orang; 1500 lembar	36.600.000	1 Orang; 1500 lembar	36.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu
			015128	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun			12 Bulan	370.008.000	12 Bulan	370.008.000	12 Bulan	370.008.000	12 Bulan	370.008.000	12 Bulan	370.008.000	12 Bulan	370.008.000	12 Bulan	370.008.000	12 Bulan	370.008.000		
			015128	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Operator Komputer, Tenaga Arsip, Tenaga Kebersihan, Tenaga Sopir dan tersedianya tenaga Mekanik dan listrik yang disediakan dalam 1 tahun			4 Orang	72.000.000	4 Orang	340.270.560	16 Orang	340.270.560	16 Orang	340.270.560	16 Orang	340.270.560	16 Orang	340.270.560	16 Orang	340.270.560	16 Orang	340.270.560		
			015129	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Penunjang Urusan BPBD				925.000.000	100%	1.048.550.000	100%	1.048.550.000	100%	1.425.629.168	100%	1.309.500.654	100%	1.309.500.654	100%	1.309.500.654	100%	1.309.500.654	BPBD	Kabupaten Bengkulu
			015129	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dalam 1 Tahun			6 Unit	250.000.000	6 Unit	234.770.000	6 Unit	234.770.000	6 Unit	500.000.000	12 Unit	383.871.486	12 Unit	383.871.486	12 Unit	383.871.486	12 Unit	383.871.486	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu
			015129	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dalam 1 Tahun			10 Unit	250.000.000	10 Unit	330.620.000	10 Unit	330.620.000	10 Unit	542.469.168	10 Unit	542.469.168	10 Unit	542.469.168	10 Unit	542.469.168	10 Unit	542.469.168		
			015129	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun			1 Tahun	425.000.000	1 Tahun	483.160.000	1 Tahun	483.160.000	1 Tahun	383.160.000	1 Tahun	383.160.000	1 Tahun	383.160.000	1 Tahun	383.160.000	1 Tahun	383.160.000		



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI								
						DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	RP										
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP										
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
S.3. Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	S.3.1. Persentase Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	1 0 0 2 0 7	0 5 3 . 0 2	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi fasilitasi dan rehabilitasi daerah rawan bencana di wilayah kabupaten bengkalis dan terwujudnya data, kerusakan dan kerugian daerah dampak pasca bencana			1 Tahun; 1 Dokumen	150.000.000	1 Tahun; 1 Dokumen	100.000.000	1 Tahun; 1 Dokumen	100.000.000	1 Tahun; 1 Dokumen	100.000.000	1 Tahun; 1 Dokumen	100.000.000	1 Tahun; 1 Dokumen	100.000.000	1 Tahun; 1 Dokumen	100.000.000										
				S.1. Meningkatnya Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	S.1.1. Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	1 0 0 2 0 8	0 5 3 . 0 2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Rescue/TRC yang terlatih dalam Penanggulangan Bencana			15 Orang	138.784.000	15 Orang	138.784.000	-	-	15 Orang	138.784.000	15 Orang	138.784.000	15 Orang	138.784.000	15 Orang	138.784.000						
								1 0 0 2 0 9	0 5 3 . 0 2	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah data/informasi tentang rencana kontijensi yang berhasil disusun			-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000				
										1 0 0 2 1 0	0 5 3 . 0 2	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana			-	-	-	-	100 Jiwa; 1 Tahun	250.000.000	-	-	100 Jiwa; 1 Tahun	250.000.000	-	-	-	-	-	-
1 0 0 2 1 1	0 5 3 . 0 2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Data/informasi tentang rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang berhasil disusun			-	-	-	-			1 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000								
		S.2. Meningkatnya Keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	S.2.1. Persentase Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana	1 0 0 2 0 3	0 5 3 . 0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	3.900.000.000	100%	4.086.000.000	100%	4.090.000.000	100%	4.140.000.000	100%	4.122.085.787	100%	4.022.085.787	100%	4.022.085.787	BPBD	Kabupaten Bengkalis						
1 0 0 2 0 3	0 5 3 . 0 3					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa nyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kesempatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB			-	-	-	-	100%	100.000.000	-	-	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkalis				
						1 0 0 2 0 3	0 5 3 . 0 3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kesempatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan Darurat Bencana			-	-	-	-	-	100%	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								1 0 0 2 0 3	0 5 3 . 0 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga Negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian perjenis bencana			1 Tahun; 200 Jiwa	3.750.000.000	1 Tahun; 200 Jiwa	3.640.000.000	1 Tahun; 200 Jiwa	3.640.000.000	1 Tahun; 200 Jiwa	3.640.000.000	1 Tahun; 200 Jiwa	3.672.085.787	1 Tahun; 200 Jiwa	3.672.085.787	1 Tahun; 200 Jiwa	3.672.085.787	1 Tahun; 200 Jiwa	3.672.085.787		
										1 0 0 2 0 3	0 5 3 . 0 3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang mendapat logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1 Tahun; 50 Jiwa	150.000.000	1 Tahun; 50 Jiwa	100.000.000	1 Tahun; 50 Jiwa	100.000.000	1 Tahun; 50 Jiwa	100.000.000	1 Tahun; 50 Jiwa	100.000.000	1 Tahun; 50 Jiwa	100.000.000	1 Tahun; 50 Jiwa	100.000.000	1 Tahun; 50 Jiwa	100.000.000



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijadikan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan transportasi yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan bencana yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis**  
**yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2021)	TARGET KINERJA TAHUN KE					Kondisi pada akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Persentase Response Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	60%	70%	80%	90%	95%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Kesimpulan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran BPBD sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk

menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra BPBD adalah sebagai berikut:

1. Renstra badan penanggulangan bencana daerah akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala badan pelaksana penanggulangan bencana daerah, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra badan penanggulangan bencana daerah dilakukan sekurang- kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra badan penanggulangan bencana daerah dilakukan melalui Renja badan penanggulangan bencana daerah setiap tahun dan realisasinya melalui DPA badan penanggulangan bencana daerah setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja badan penanggulangan bencana daerah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra badan penanggulangan bencana daerah dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja badan penanggulangan bencana daerah diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama

RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Bengkalis, Desember 2021

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



**HADI PRASETYO, ST**

Pembina Tk.I

NIP.19790520 200502 1 001

**LAMPIRAN 1.**  
**Matrik Analisa SWOT**

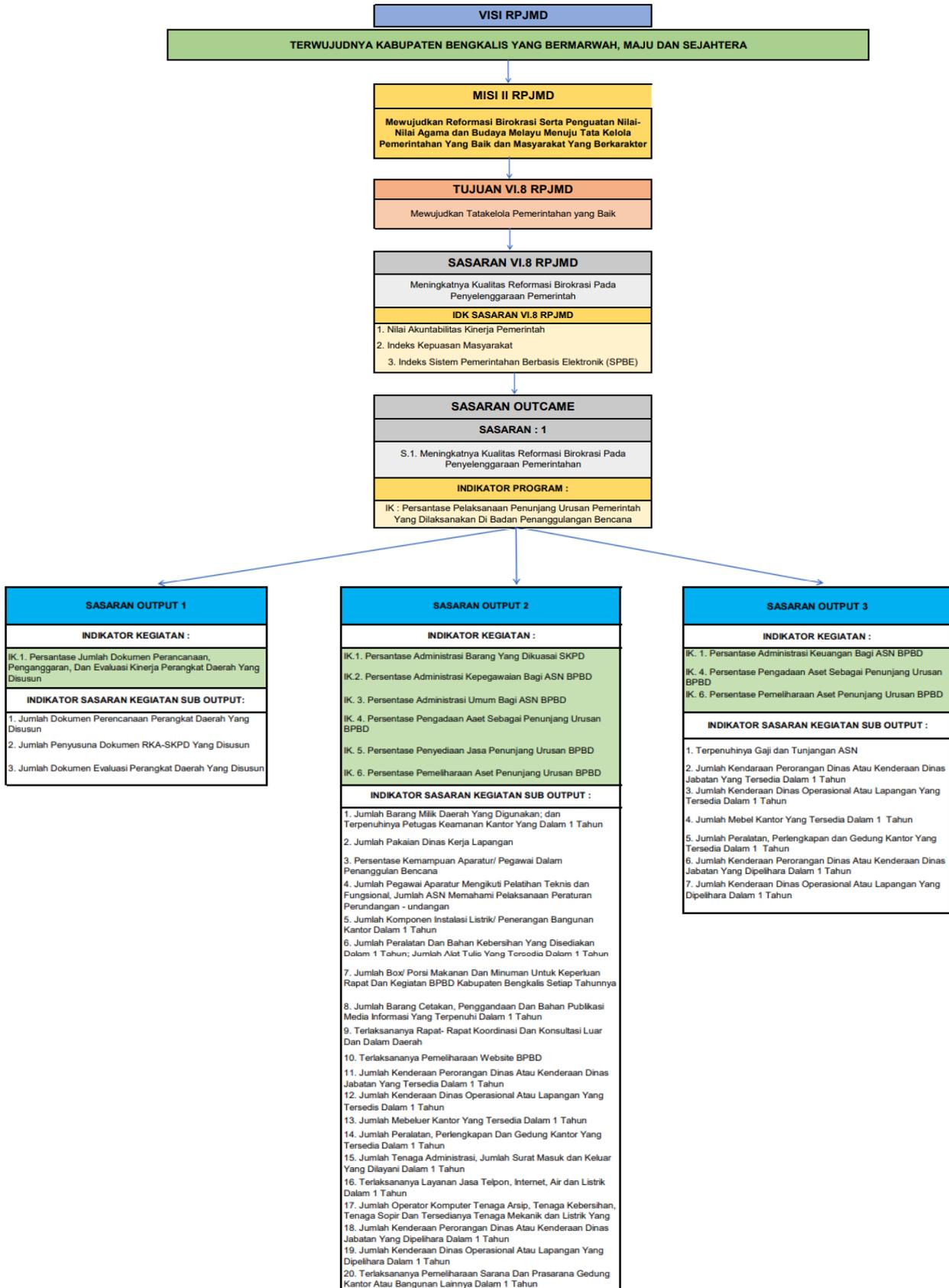
<p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p><b>Faktor Internal</b></p>	<p><b>Peluang (O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Jumlah Personil dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</li> <li>2. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penanggulangan Bencana Baik Status Siaga Darurat maupun Tanggap Darurat Bencana;</li> <li>3. Penanggulangan Bencana Di Tangani Secara Tim Dengan Melibatkan Stakeholder Terkait</li> </ol>	<p><b>Tantangan (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasnya Jangkauan wilayah Penanggulangan Bencana;</li> <li>2. Koordinasi antar Instansi Terkait Belum Maksimal;</li> <li>3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Resiko Bencana;</li> </ol>
<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;</li> <li>2. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;</li> <li>3. Penempatan Personil Sudah Ada Di Setiap Kecamatan;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana;</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM masih belum memadai;</li> <li>2. Belum terdapatnya informasi kebencanaan dalam daerah;</li> <li>3. Kurangnya sarana dan prasarana Serta Logistik bencana;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Logistik Bencana;</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Koordinasi Yang Baik dalam Penanggulangan Bencana;</li> </ol>

## LAMPIRAN 2.

### Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Indikator

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL/PENJELASAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut Pelatihan Dalam Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan}}{\text{Jumlah Aparatur dan Warga Negara dikawasan rawan bencana}} \times 100\%$
	Meningkatnya keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Response Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana	Persentase (%) Kecepatan Response Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB	$\frac{\text{Jumlah kesempatan response kurang dari 24 jam untuk setiap penatapan KLB}}{\text{Jumlah Seluruh Penetapan KLB}} \times 100\%$
	Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	Jumlah Kawasan Terkena Bencana yang Memperoleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	$\frac{\text{Jumlah Kawasan yang Memperoleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana}}{\text{Jumlah Kawasan yang terkena bencana}} \times 100\%$

### LAMPIRAN 3. Pohon Kinerja/Cascading Misi 2



# LAMPIRAN 4

## Pohon Kinerja/Cascading Misi 3

